

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penulisan dalam tesis yang memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi. Penulisan tersebut merujuk pada tinjauan pustaka, hasil-hasil penelitian, temuan dan pembahasan. Penyajian diawajali dengan deskripsi simpulan yang diuraikan dalam simpulan umum dan simpulan khusus serta dilanjutkan dengan implikasi dan rekomendasi.

A. Simpulan

Penyajian diawali dengan deskripsi simpulan yang diuraikan dalam simpulan umum dan simpulan khusus dilanjutkan dengan implikasi dan rekomendasi.

1. Simpulan Umum

Transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* yaitu transformasi pemikiran politik kebangsaan. Karena itu, Muhammadiyah membagi dua wilayah gerakan transformasi yaitu: wilayah politik kenegaraan dan wilayah politik dakwah kemasyarakatan. Muhammadiyah memainkan peran dan fungsi sosial kemasyarakatannya dalam dua strategi lapangan perjuangan politik, yaitu: *Pertama*, melalui sosialisasi dan kegiatan politik yang bermuara pada ruang kekuasaan politik sebagaimana peran politik yang dimainkan oleh politik formal pada level kenegaraan atau peran politik yang dimainkan oleh partai-partai politik. *Kedua*, melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah memainkan peran dan fungsi organisasi yang bersifat pada pembinaan dan pemberdayaan *civil society* ataupun perilaku politik yang tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan berpijak pada perjuangan moral (*moral force*) dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan kewarganegaraan yang demokratis seperti yang dilakukan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) pada umumnya.

2. Simpulan Khusus

Berdasarkan simpulan umum di atas, maka dapat dirumuskan simpulan khusus sebagai berikut:

- a. Peran pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam penguatan *civil society* menuju Indonesia berkemajuan telah dipancarkan oleh beberapa tokoh intelektual seperti Amien Rais, yang menjadi lokomotif

gerakan reformasi 1998 hingga menumbangkan rezim Orde Baru; Ahmad Syafii Maarif sebagai tokoh pluralisme dan kemanusiaan; Din Syamsuddin sebagai tokoh humanisme lintas agama dan peradaban internasional, dan Haedar Nashir sebagai tokoh bangsa yang *welasasi*. Peran pemikiran politik intelektual Muhammadiyah telah berkontribusi dalam pembentukan reformasi yang demokratis dan konstitusional.

- b. Transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah era reformasi dalam mewujudkan kewarganegaraan demokrasi dalam penguatan *civil society* menuju Indonesia lebih kepada: transformasi kelas menengah melalui lapisan kader yang terdidik, membangun integrasi sosial kewarganegaraan, peningkatan kualitas hidup warga negara, pemberdayaan *civil society*, membela kedaulatan negara dan mengembangkan nilai-nilai keadaban untuk Indonesia berkemajuan. Penguatan *civil society* di era reformasi merupakan cita-cita luhur moral Muhammadiyah dalam membangun infrastruktur bangsa yang tidak kalah pentingnya dengan gerakan politik praktis yang dimainkan oleh partai-partai politik.
- c. Dampak dari transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dalam penguatan *civil society* di era reformasi adalah dapat melumpuhkan mentalitas inlander dan membentuk sikap dan perilaku kewarganegaraan demokratis, kesadaran *humanitarianism* yang dapat menghubungkan perkembangan ekonomi dan kesadaran sosial yang dapat mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan demokrasi, mengurangi statistik pemikiran irasional seperti tahayul dan mitos kebudayaan dengan menaikkan satu octave pemikiran kritis yang dilandasi dengan pemikiran rasional, dan berhasil memperdayakan potensi perempuan melalui ortom Aisyiyah, untuk menyalurkan aspirasi perempuan yang berkaitan dengan isu-isu gender.

B. Implikasi Penelitian

Berikut ini merupakan implikasi dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Transformasi pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dalam penguatan *civil society* dapat dijadikan model politik adiluhung (*high politic*) yang dapat dipertimbangkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan.
2. Penguatan *civil society* di era reformasi tetap dilakukan dalam rangka menginternalisasi konsep kewarganegaraan yang demokratis.
3. Nilai-nilai luhur moral pancasila merupakan basis epistemologi pemikiran politik dalam penguatan *civil society* menuju Indonesia berkemajuan.
4. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan contoh konsep kewarganegaraan yang demokratis di tengah melemahnya *civil society* di Indonesia.
5. Aktifis dan pegiat sosial dapat diarahkan menjadi sebuah gerakan *civil society* yang dapat melestarikan nilai luhur konsep kewarganegaraan demokratis untuk menuju Indonesia yang berkemajuan.

C. Rekomendasi

Penelitian ini terbatas pada intelektual Muhammadiyah era reformasi yang terkait dengan transformasi pemikiran politik dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Karena itu peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan dan kajian praksis sebagai berikut:

1. Intelektual Muhammadiyah

- a) Perlu adanya revitalisasi pemikiran dan gerakan politik yang lebih runcing dalam rangka dakwah *amal ma'ruf nahi munkar* dalam wilayah politik kenegaraan melalui keterlibatan langsung dalam dunia politik praktis.
- b) Perlu adanya gerakan tajdid yang militan dalam transformasi pemikiran politik kebangsaan intelektual Muhammadiyah era reformasi, dalam wilayah politik dakwah kemasyarakatan sehingga berdampak pada kepengikutan masyarakat terhadap ide-gagasan dan langkah-langkah gerakan politik yang diakibatkan oleh transformasi gerakan tajdid Muhammadiyah.

2. Akademisi dan Peneliti selanjutnya

- a) Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap pemikiran politik intelektual Muhammadiyah yang berada dalam priode yang sama dalam era reformasi dalam rangka penguatan *body of knowledge* pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu disiplin ilmu mandiri.
- b) Ruang lingkup obyek penelitian yang peneliti lakukan terhadap intelektual Muhammadiyah era reformasi perlu dikembangkan lebih lanjut agar semakin komprehensif baik terkait dengan ide-gagasan maupun aktivitas yang dilaksanakannya.
- c) Perlu dilakukan penelitian terhadap pemikiran politik intelektual Muhammadiyah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner yang berkaitan dengan ide-gagasan dan gerakan tajdid yang ditransformasikan.

3. Kaprodi Pendidikan Kewarganegaraan

- a) Perlu dilakukan reformulasi metodologi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan pada pola gerakan sosiokultural sebagaimana yang dilakukan oleh intelektual Muhammadiyah agar berdampak positif bagi pengembangan kesadaran, kepedulian, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan.
- b) Perlu dilakukan penataan ulang terhadap materi kajian pendidikan kewarganegaraan dalam praksis pembelajaran dengan mempertimbangkan pemikiran politik kebangsaan intelektual Muhammadiyah sebagai obyek telaah pada kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan pada semua jenjang pendidikan.